

NASKAH PUBLIKASI

**Komunikasi Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Penataan Kawasan
Malioboro tahun 2015-2016**

Erinda Alfiani Fauzi

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta, Indonesia

erindaalfiani1996@gmail.com



NASKAH PUBLIKASI
Komunikasi Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Penataan Kawasan
Malioboro tahun 2015-2016

Oleh:

Erinda Alfiani Fauzi

20140520012

Telah di setujui dan disahkan pada:
Hari dan tanggal : 2 Maret 2018
Tempat : Ruang Igov Lama
Waktu : 10.00-11.00 WIB

Dosen Pembimbing



Dian Eka Rahmawati, S.IP., M.Si



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si.



Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan

Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si

ABSTRACT

This study aims to determine the communication process of Yogyakarta city in the arrangement in the region of Malioboro. Because government communication is done related to the policy that will be done by the government itself. Because community participation will be built in this government communication process so that policies can be implemented properly. Then the location of this research is located in the city of Yogyakarta with the involvement of Yogyakarta Special Region, Yogyakarta Tourism and Culture Office, Technical Implementation Unit Malioboro, Paguyuban Parking, PKL and tourists visiting the area of Malioboro. In the communication process of the government there should be six elements that must be fulfilled in order for the communication process to proceed: (1) Who is the speaker or communicator, (2) There is a message or information to be conveyed, (3) There is a channel or message of media delivery There is an audience or communicant, (5) effects or feedback from the communication process. This research uses qualitative method that aims to explain how the process of regulating communication in the Malioboro region occurs.

Keywords: *Government Communication, Urban Planning, Yogyakarta City*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses komunikasi pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan penataan di kawasan Malioboro . Karena komunikasi pemerintahan yang dilakukan berkenaan dengan kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Karena partisipasi masyarakat akan dibangun dalam proses komunikasi pemerintah ini agar kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Kemudian lokasi penelitian ini berada di Kota Yogyakarta dengan melibatkan Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta ,Unit Pelaksana Teknis Malioboro , Paguyuban Parkir, Pedagang kaki lima dan Masyarakat atau wisatawan yang berkunjung ke kawasan Malioboro. Dalam proses komunikasi pemerintah harusnya terdapat enam elemen yang harus di penuhi agar proses komunikasi berjalan : (1) Siapa pembicara atau Komunikator, (2) Terdapat pesan atau informasi yang akan di sampaikan, (3) Terdapat sebuah saluran atau media penyampaian pesan, (4) Terdapat audience atau Komunikan, (5) adanya efek atau Feedback dari proses komunikasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana proses komunikasi penataan di kawasan Malioboro terjadi.

Kata kunci: *Komunikasi Pemerintahan , Kota Yogyakarta, Tata Kota*

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses komunikasi pemerintah dalam penataan kawasan Malioboro. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bahwa proses komunikasi pemerintahan berbeda dengan proses komunikasi pada umumnya. Dimana, proses komunikasi pemerintahan terdapat loby dan adanya tarik ulur kepentingan politik. Penelitian ini dilakukan di kawasan Malioboro yang sebenarnya adalah tujuan pariwisata di kota Yogyakarta. Kawasan Malioboro menjadi tidak teratur karena pedestrian menjadi tempat parkir kendaraan bermotor dan menjadi tempat berjualan pedagang kaki lima. Dalam rangka memperbaiki kawasan Malioboro maka relokasi pun dilakukan. Relokasi perlu dilakukan dalam upaya menambah daya tarik dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah tersebut. Terdapat 3 objek yang akan terlibat dalam penataan kawasan Malioboro, yang pertama adalah Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima dan Masyarakat atau wisatawan yang berkunjung ke kawasan Malioboro. Maka untuk implementasi kebijakan, pemerintah melakukan komunikasi kepada 3 objek tersebut. Komunikasi yang dilakukan dalam proses implementasi kebijakan penataan kawasan Malioboro bertujuan untuk Pembangunan. Dilla (2012) dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Pembangunan menjelaskan bahwa komunikasi Pembangunan adalah sebagai upaya, cara dan teknik penyampaian gagasan dan keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dalam hal ini pemerintah kepada masyarakat sebagai sasaran agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardiansah pada tahun 2014 dalam bentuk Thesis di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul : Kampung Bahasa Sebagai City Branding Kota Pare : Studi Kualitatif Komunikasi Pemerintah Kabupaten Pare. Dari penelitian di atas Komunikasi pemerintah dilakukan dengan membuat kegiatan pariwisata guna mensosialisasikan kepada masyarakat (Ardiansah, 2014). Selain itu, komunikasi juga dilaksanakan dengan cara sosialisasi dengan media massa. Selain itu, komunikasi pemerintah dilakukan dengan cara menjalin kerjasama dengan pihak swasta agar informasi lebih cepat tersebar dan meluas. Cara yang dilakukan hanya sosialisasi dengan media massa dan tidak di munculkan loby loby seperti halnya komunikasi pemerintahan pada umumnya. Proses Komunikasi Pemerintah berbeda dengan proses Komunikasi pada umumnya. Karena didalam proses Komunikasi Pemerintah terdapat loby-loby yang dilakukan oleh pemerintah. Proses komunikasi yang dilakukan bertujuan untuk menyampaikan kepentingan-kepentingan Komunikator atau komunikan yang terkait. Sehingga, dalam prosesnya komunikasi pemerintahan dapat mengalami tarik ulur kepentingan sehingga dapat memakan waktu yang lama. Karena kepentingan yang berbeda dari ketiga objek yaitu juru parkir, Pedagang Kaki Lima dan Wisatawan dapat di pastikan proses, *Feedback* dan hasilnya pun berbeda.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah dalam melakukan proses komunikasi pemerintah hanya berkomunikasi dengan satu objek saja. Berbeda dengan penataan kawasan malioboro pemerintah melakukan komunikasi kepada tiga objek sekaligus yaitu juru parkir, pedagang kaki lima dan masyarakat atau wisatawan yang berkunjung ke

kawasan malioboro. Dalam proses komunikasi dalam penataan kawasan malioboro ini adanya tarik ulur kepentingan dan loby yang terjadi sehingga proses komunikasi ini berbeda dengan proses komunikasi umum. Proses komunikasi yang dilakukan di kawasan Malioboro ini adalah proses komunikasi pemerintahan.

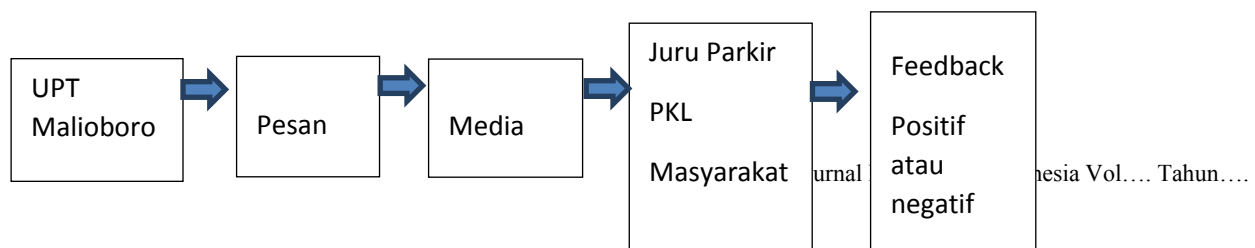
PEMBAHASAN

PROSES KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DALAM PENATAAN KAWASAN MALIOBORO

Proses komunikasi pemerintahan yang dilakukan didalam penataan kawasan malioboro ini melibatkan komunitas yang ada di kawasan malioboro tersebut. Komunitas tersebut yaitu paguyuban parkir atau komunitas parkir, paguyuban pedagang kaki lima atau komunitas PKL dan masyarakat atau wisatawan yang berkunjung. Keterlibatan Pemerintah sebagai Pemangku kepentingan sangatlah penting dalam proses komunikasi. Eko Priyo Purnomo (2010) dalam artikelnya yang berjudul *Development of Local Institutions towards on Participation and Communication Model in the United Kingdom* menyatakan bahwa terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan model komunikasi yang berkaitan dengan komunitas, pertama mekanisme hukum yang dapat menetapkan aturan, kedua peningkatan kapasitas yang membuat komunitas lokal dapat membangun hubungan yang setara dengan pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah, ketiga adalah transparansi kelembagaan atau pemangku kepentingan yang dapat di tunjukan dengan model komunikasi yang dipakai pemerintah dan keempat adalah kerjasama yang baik antara komunitas dan pemangku kepentingan

Membentuk kerjasama yang baik antara komunitas dan pemerintah maka dilakukanlah penataan kota yang baik dengan melakukan komunikasi secara efektif. Tata Ruang Menurut M. Arzandi adalah pengaturan tentang penggunaan ruang atau lahan yang ada. Lahan tersebut harus di tata agar tidak mengganggu hak orang lain. Karena, adanya hak pemanfaatan ruang dari seseorang akan mengganggu hak oranglain bahkan hak komunitas yang lebih besar(Pratama, Wiriawan, Maria, Bidari, & Santoso, 2015).

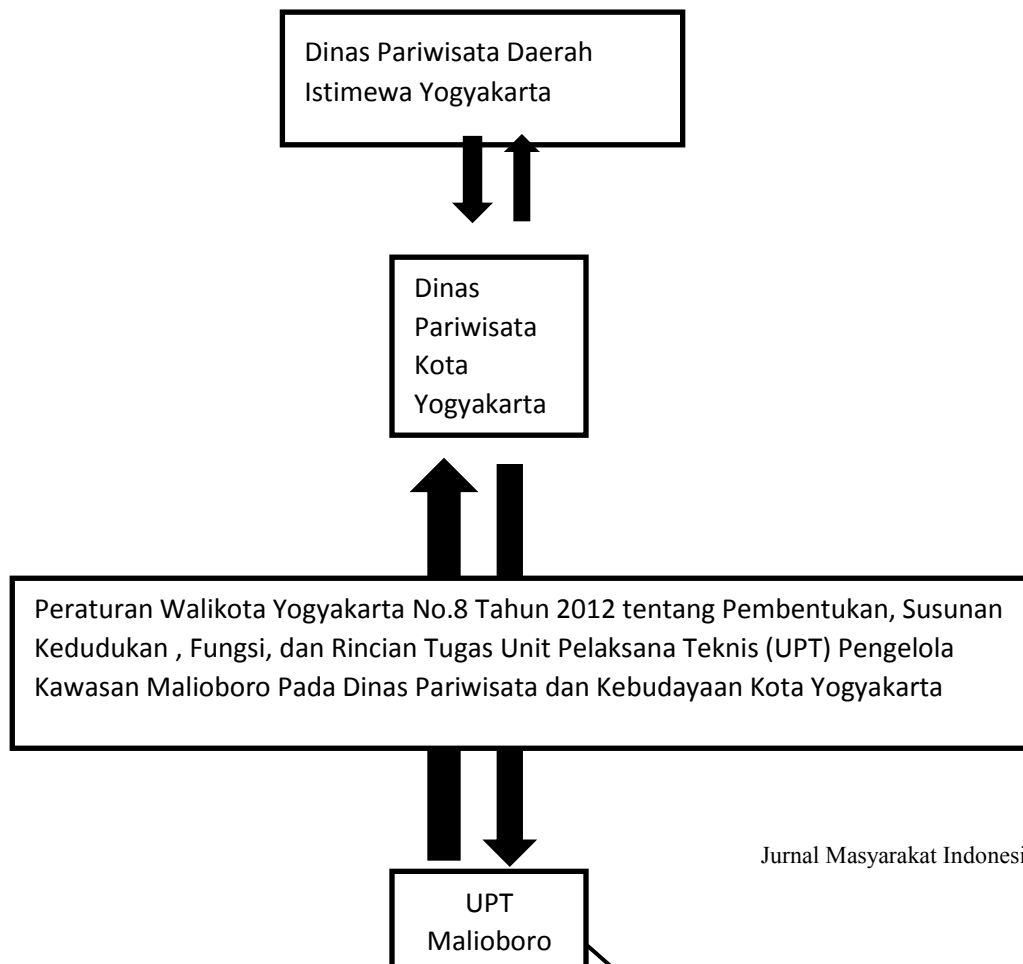
Proses komunikasi yang dilakukan pemerintah dilakukan oleh UPT Malioboro berkoordinasi dengan beberapa dinas pendukung dan Pemerintah Provinsi. Komunikasi Pemerintahan menurut model Lasswell yaitu komunikasi yang ditunjukkan kepada siapa, dan berpengaruh apa kepada komunikan. Dimana terdapat beberapa elemen yang terdapat pada model Lasswell yaitu siapa pembicara, terdapat pesan, saluran atau medium , siapa audience dan efek yang ditimbulkan(Abidin, 2016). Proses komunikasi dimulai dengan penyampaian pesan melalui media yang di pilih oleh komunikator dan di terima oleh komunikan. Komunikan menerima pesan ini akan memberikan feedback kepada komunikator.

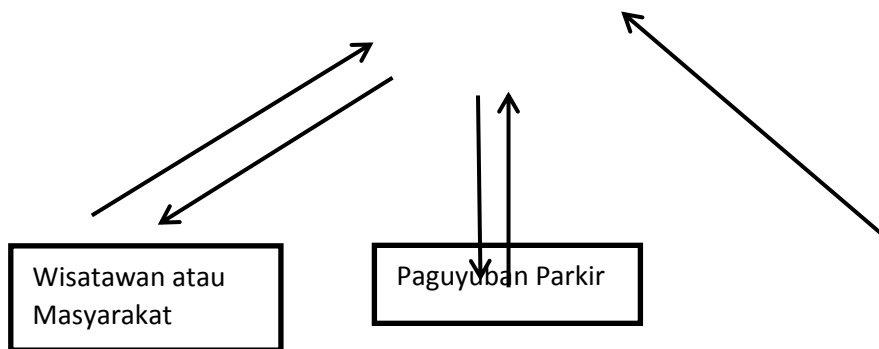


Gambar 2. Proses Komunikasi menurut Paradigma Lasswel.

Sumber : Wawancara Narasumber

Terdapat 3 objek yang akan terlibat dalam penataan kawasan Malioboro , yang pertama adalah Juru Parkir , Pedagang Kaki Lima dan Masyarakat atau wisatawan yang berkunjung ke kawasan Malioboro. Maka untuk implementasi kebijakan, pemerintah melakukan komunikasi kepada 3 objek tersebut. Komunikasi yang dilakukan dalam proses implementasi kebijakan penataan kawasan Malioboro bertujuan untuk Pembangunan. Dilla (2012) dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Pembangunan menjelaskan bahwa komunikasi Pembangunan adalah sebagai upaya, cara dan teknik penyampaian gagasan dan keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakasai pembangunan dalam hal ini pemerintah kepada masyarakat sebagai sasaran agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan.





Gambar 3. Proses Komunikasi dan koordinasi dalam Penataan Kawasan Malioboro

Sumber : Wawancara Narasumber

PROSES KOMUNIKASI PEMERINTAH KEPADA PAGUYUBAN PARKIR

Proses komunikasi pemerintah ke paguyuban parkir dilakukan oleh UPT Malioboro dengan mengirim pesan dalam bentuk surat edaran atau undangan kepada ketua paguyuban parkir. Setelah pesan tersebut di terima, paguyuban parkir memberikan *feedback* kepada pemerintah. Pemerintah dalam hal ini mengubah saluran atau media pesan dan memutuskan unruk bertatap muka langsung dengan teman-teman parkir. Pemerintah menganti saluran dan media penyampaian pesan karena menerima feedback dari paguyuban parkir.

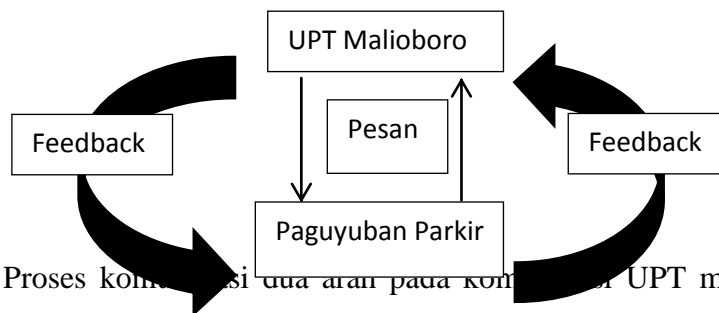
Dalam proses komunikasi yang terjadi didalam penataan kawasan Malioboro sarat dengan kepentingan beberapa pihak. Dimana dalam proses ini , pada objek paguyuban parkir terjadi tarik ulur dalam proses komunikasi. Tarik ulur terjadi selama 6 bulan lamanya, dimana paguyuban parkir dan pemerintah sebagai komunikator tidak menemukan titik temu atau kesepakatan. Namun, Taman Parkir Abu Bakar Ali tetap dibangun tanpa melibatkan paguyuban parkir. Pembangunan ini terjadi karena adanya Koordinasi antar dinas untuk melaksanakan program. Koordinasi ini terjadi karena adanya komunikasi Horizontal antar organisasi yang saling melakukan timbal balik.

Untuk mencapai kata sepakat, pemerintah melakukan lobby kepada masyarakat dengan menjanjikan izin pendirian usaha kepada juru parkir sebagai pengganti dari pekerjaan mereka sebagai juru parkir. Penerbitan ijin berdagang ini dilakukan oleh pemerintah sebagai usaha untuk mencapai kesepakatan. Setelah penerbitan ijin usaha dagang yang dijanjikan feedback yang diberikan juru parkir sangatlah baik dan mencapai kesepakatan untuk relokasi.

Setelah Taman Pakir Abu Bakar Ali dibangun dan diselesaikan relokasi akhirnya tetap berlangsung dimana 120 orang juru parkir di relokasi ke Taman Parkir Abu Bakar Ali. Teman

parkir yang berada di abubakar ali menyampaikan bahwa pendapatan masih tidak pasti sehingga mereka ingin bantuan dari pemerintah. Teman juru parkir masih terus menagih janji dari pemerintah tentang penerbitan ijin usaha tersebut namun feedback dr pemerintah tidak baik dan ijin usaha tidak dapat diberikan kembali.

Walaupun tedapat janji-janji politik yang tidak terealisasikan juru parkir bertahan dan melangsungkan pekerjaan di Taman parkir Abu Bakar Ali.Untuk merespon keluhan dari juru parir, maka Juru parkir yang direlokasi ke Taman Parkir Abu Bakar Ali di bina oleh UPT Malioboro.pembinaan ini adalah sebuah Feedback yang diberikan oleh UPT menanggapi keluhan yang di sampaikan kepada UPT . Pembinaan ini berlangsung dalam 2 bulan dengan pemberian gaji sebesar Rp.70.000 – Rp.50.000 kepada juru parkir.

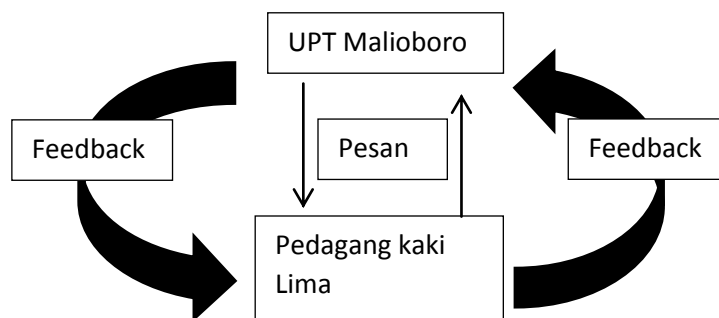


Gambar 4. Proses komunikasi antara para kom... UPT malioboro kepada Paguyuban Parkir

Sumber : Wawancara Narasumber.

PROSES KOMUNIKASI PEMERINTAH KEPADA PKL

Proses Komunikasi Pemerintah kepada PKL memberitahukan bahwa aka nada perbaikan sepanjang pesisir Malioboro dan terjadilah tatap muka antara pemerintah dan PKL.



Gambar 5. Proses Komunikasi pemerintah kepada PKL

Sumber : Wawancara Narasumber

Proses komunikasi pemerintah kepada PKL berjalan dengan cukup mulus. Pemerintah melakukan lobby dengan memastikan bahwa PKL tetap dapat berjalan dipesisir malioboro namun pada saat relokasi dan revitalisasi pedestrian terjadi PKL Harus menutup lapak mereka

secara bergantian. Pemerintah dan PKL mencapai satu suara dan sepakat. Setelah menerima *feedback* yang baik pemerintah melanjutkan program yang di komunikasikan dan semua berjalan dengan lancar.

PROSES KOMUNIKASI PEMERINTAH KEPADA MASYARAKAT

Proses komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat berjalan dengan baik. Dengan tercapainya relokasi parkir dari pesisir malioboro ke Taman Parkir Abu Bakar Ali. Pemerintah memasang beberapa spanduk di pertigaan jalan Malioboro dan Abu Bakar Ali untuk melakukan komunikasi kepada masyarakat. Beberapa Masyarakat yang mengunjungi Malioboro mengetahui relokasi parkir dari sosial media.

Proses komunikasi kepada wisatawan juga dibantu oleh PKL yang berjualan di pesisir Malioboro dalam hal perbaikan pedestrian Malioboro. Masyarakat ataupun wisatawan cenderung bertanya kepada para PKL dan Petugas Keamanan yang berjaga di Pesisir Malioboro mengetahui informasi tersebut. Dikatakan oleh Diah seorang Mahasiswa juga yang berkunjung ke Malioboro.

KOMUNIKATOR

Dalam proses komunikasi pemerintahan menurut Laswell yang berperan sebagai komunikator tentunya adalah pemerintah yang diwakilkan oleh lembaga ataupun dinas terkait yang melakukan komunikasi. Dalam proses penataan kawasan malioboro ini, UPT Malioboro yang bertugas menjadi komunikator.

Terbitnya Peraturan Walikota Yogyakarta No.8 tahun 2012 tentang pembentukan, susunan kedudukan, fungsi dan rincian tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) pengelolaan kawasan Malioboro pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta maka segala sesuatu yang berhubungan dengan penataan dan pengkomunikasian kawasan Malioboro akan ditangani oleh UPT berkerjasama dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan terbitnya Peraturan walikota tersebut maka UPT Malioboro adalah komunikator dalam segala kegiatan penataan kawasan malioboro.

Komunikator dalam proses Komunikasi Pemerintah juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk melancarkan proses Komunikasi. UPT Malioboro dalam hal ini berkerja sama dengan beberapa pihak untuk melaksanakan tugasnya sebagai komunikator seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.

Tabel Komunikator Proses Komunikasi penataan kawasan Malioboro

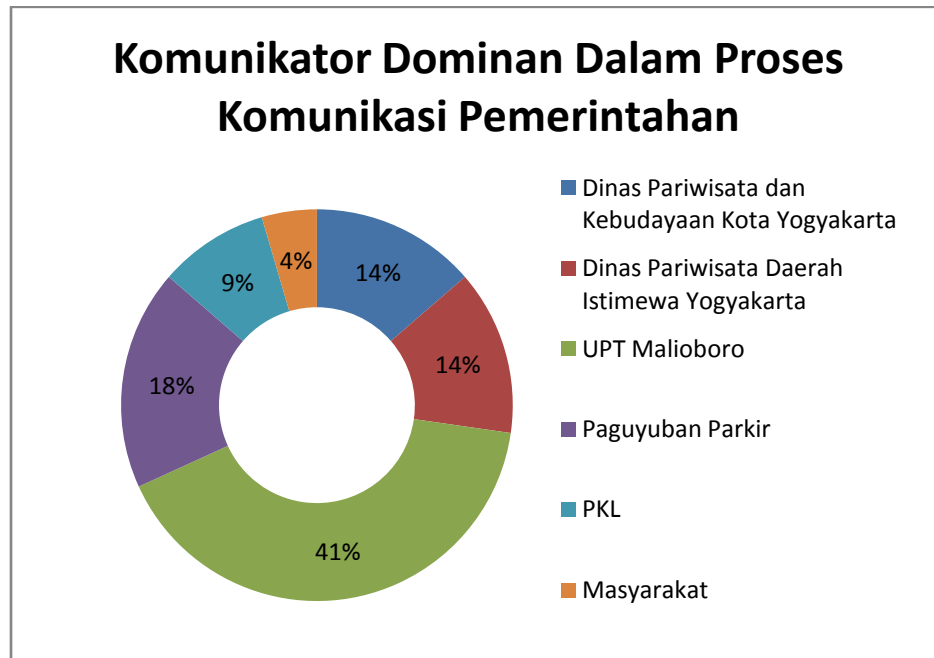
No	Proses Komunikasi Pemerintah	Kasus	Komunikator
1	Sosialisasi 1 Tahun sebelum Relokasi Parkir ke taman parkir Abu Bakar Ali	Parkir	UPT Malioboro

2	Pemberian Undangan untuk tatap muka 6 bulan sebelum relokasi ke taman parkir Abu Bakar Ali	Parkir	UPT Malioboro
3	Sharing atau Tatap muka pertama 6 bulan sebelum relokasi ke taman parkir Abu Bakar Ali	Parkir	UPT Malioboro , Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta,Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dan Paguyuban Parkir
4	Sharing dan Negosiasi 3 bulan sebelum pembangunan taman parkir Abu Bakar Ali	Parkir	UPT Malioboro, Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dan Paguyuban Parkir
5	Terjadi Loby antara juru Parkir dan UPT Malioboro (berkaitan dengan izin untuk berdagang di pesisir malioboro)	Parkir	UPT Malioboro dan Paguyuban Parkir
6	Terjadi Loby antara UPT Malioboro dan Juru Parkir (Berkaitan dengan pemberian subsidi kepada juru parkir ketika pindah ke taman parkir Abu Bakar Ali selama 3 bulan dengan nominal Rp.70.000-Rp.50.000)	Parkir	UPT Malioboro dan Paguyuban Parkir
7	Memberikan surat undangan berkaitan dengan perbaikan sepanjang pedestrian Malioboro	Pedagang Kaki Lima	UPT Malioboro
8	Sosialisasi dan Negosiasi dalam perbaikan sepanjang pesisir Malioboro	Pedagang Kaki Lima	UPT Malioboro , Dinas Pariwisata Daerah istimewa Yogyakarta, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dan Pedagang Kaki Lima
9	Pemberitahuan Relokasi parkir dari pesisir malioboro ke Taman Parkir Abu Bakar Ali dengan memasang spanduk dan menyebarkan informasi melalui media visual , audio dan	Masyarakat atau Wisatawan	UPT Malioboro , Masyarakat dan Pedagang Kaki Lima

audiovisual.		
--------------	--	--

Sumber : Wawancara Narasumber

Tabel Komunikator Proses Komunikasi penataan kawasan Malioboro menunjukkan bahwa UPT Malioboro menjadi Komunikator yang melakukan proses komunikasi paling dominan.



Gambar 6. Komunikator Dominan Dalam proses Komunikasi Pemerintahan

Sumber : Data Diolah Penulis

Gambar Komunikator dominan dalam proses komunikasi pemerintahan menunjukan bahwa 41% UPT Malioboro menjadi komunikator dominan dalam melakukan proses komunikasi pemerintahan dalam penataan kawasan Malioboro. Paguyuban Parkir menjadi komunikator kedua dengan perolehan 18% . Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dan Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dalam proses komunikasi pemerintah mendapatkan perolehan 14% . Partisipasi PKL sebanyak 9% dalam membantu proses komunikasi pemerintahan dalam penataan kawasan malioboro dengan membantu menyebarkan informasi penataan di bantu dengan masyarakat sebanyak 4%.

Pesan yang terdapat dalam proses komunikasi pemerintahan ini ditujukan kepada masyarakat. Terdapat beberapa pesan yang ada di dalam proses penataan kawasan malioboro seperti yang dijabarkan dibawah ini:

- a. Pesan yang pertama adalah pemberitahuan kepada Juru parkir bahwa kegiatan perparkiran akan di relokasi ke taman parkir Abu Bakar ali yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Pesan yang kedua adalah informasi perpindahan atau relokasi parkir kepada pejalan kaki di kawasan Malioboro.
- c. Pesan yang ke-tiga adalah pemberitahuan kepada PKL yang bertempat di pesisir malioboro yang didominasi oleh penjual makanan bahwa akan ada renovasi yang dilakukan di sepanjang pedestrian malioboro sehingga PKL harus menutup lapak mereka untuk sementara waktu.
- d. Pesan yang keempat adalah informasi kepada wisatawan dan masyarakat yang mengunjungi Malioboro bahwa akan ada pekerjaan proyek yang tersebar di sepanjang jalan malioboro pada saat renovasi berlangsung agar dapat berhati-hati.

Tabel 2.

Tabel Pesan dalam proses Komunikasi Pemerintah dalam penataan kawasan Malioboro

Kasus	Pesan yang disampaikan
Parkir	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran
PKL	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro- A.Yani
Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapatnya galian , bahan bangunan dan tempat yang ditutup disepanjang pedestrian malioboro sehingga untuk sementara tidak dapat dilalui oleh pejalan kaki. • Relokasi parkir dari pesisir malioboro ke taman Parkir Abu Bakar Ali.

Sumber: wawawancara narasumber

MEDIA

Dalam proses Komunikasi pemerintah dalam penataan kawasan malioboro ini, pemerintah menggunakan media komunikasi eksternal yaitu dengan memasukan pesan kedalam beberapa Media ssebagai berikut :

- a. Media cetak contohnya surat harian Kedaulatan Rakyat. Atau dengan surat edaran yang di cetak langsung oleh pemerintah dan diberikan kepada ketua paguyuban masing-masing paguyuban PKL dan Juru parkir.
- b. Media yang dapat di lihat atau media Visual yaitu pemasakan spanduk di sudut jalan yang ramai seperti pertigaan abu bakar ali.
- c. Media radio yang ada di Yogyakarta.
- d. Dapat juga melalui media sosial seperti Twitter , Instagram dan Facebook yang digunakan kawula muda.

Tabel 3.

Tabel Media dalam proses Komunikasi Pemerintah dalam Penataan kawasan Malioboro

Kasus	Media
Parkir	Surat Edaran Pemberitahuan Relokasi, Negosiasi dan tatap muka.
PKL	Negosiasi dan Tatap Muka.
Masyarakat	Radio , Koran KR , Spanduk dan Media Sosial.

Sumber: Wawancara Narasumber

KOMUNIKAN

Komunikan dalam proses Komunikasi adalah penerima pesan. Dalam studi kasus komunikan menerima pesan yang disampaikan.Komunikan dapat berupa suatu organisasi, perorangan ataupun organisasi yang di wakili oleh seorang ketua. Komunikan dalam proses komunikasi ini terdiri dari Juru Parkir , Pedagang Kaki Lima dan Masyarakat.

Tabel 4.

Tabel Komunikan dalam Proses Komunikasi Pemerintah dalam Penataan kawasan Malioboro

Kasus	Komunikan
Parkir	Ketua Paguyuban Parkir
PKL	Paguyuban PKL

Pedestrian	Wisatawan dan Masyarakat
Bila terjadi <i>feedback</i> dalam Proses komunikasi pemerintah dalam kasus Parkir , PKL dan Pedestrian	Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Kota Yogyakarta , Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dan UPT Malioboro

Sumber: Wawancara Narasumber

UMPAN BALIK ATAU FEEDBACK

Umpan Balik atau Feedback adalah efek dari proses komunikasi yang terjadi. Pesan yang disampaikan komunikator diterima oleh komunikan. Menurut Ardianto umpan balik adalah reaksi yang timbul kepada komunikator (Ardianto, Elvinaro, & Erdiyana, 2004). Setelah menerima pesan tersebut maka komunikan memberikan tanggapan dan memberikan reaksi terhadap pesan tersebut itulah yang dinamakan umpan balik

Peran dari *feedback* sendiri adalah sebagai acuan bagi komunikator untuk melakukan langkah selanjutnya. Seperti yang kita ketahui *feedback* yang diberikan dapat berupa opini publik yang positif atau negative. Sehingga bila *feedback* yang diberikan positif maka proses komunikasi dapat di tindak lanjuti dengan program yang dilanjutkan, bila *feedback* negative maka komunikator dapat mencari saluran atau media lain agar proses komunikasi dapat berjalan lebih efektif.

Table 5.

Tabel Feedback Proses Komunikasi Pemerintah penataan kawasan Malioboro

Kasus	Feedback setelah menerima pesan	Tindak Lanjut dari Komunikator
Parkir	Negatif - melakukan penolakan	Komunikator memilih bahasa , saluran dan media yang lain,
Pedagang Kaki Lima	Positif – sepatutnya untuk menutup lapak mereka secara bergantian	Komunikator melakukan tindak lanjut dengan melaksanakan penataan kawasan Malioboro.
Masyarakat atau Wisatawan	Positif – Berpindah Parkir ke Taman Parkir Abu Bakar Ali	Komunikator melakukan tindak lanjut dengan melaksanakan penataan kawasan Malioboro.

Sumber : Wawancara Narasumber

FEEDBACK JURU PARKIR

Umpan balik terjadi berbeda dan terpecah yang positif dan negatif. Dalam pertemuan tatap muka pertama dapat disimpulkan, terdapat dua kubu dalam Paguyuban Parkir Malioboro. Dua kubu tersebut yang pertama adalah para juru parkir yang menstujui program relokasi parkir dan kubu yang kedua adalah juru parkir yang tidak menstujui relokasi tersebut.

FEEDBACK PKL

Umpan balik yang di berikan oleh PKL setelah menerima pesan sangatlah baik dan positif sehingga proses penataan dapat dilakukan dengan mudah. Maka, semua Pedagang Kaki Lima mayoritas berjualan makanan setuju untuk menutup lapak ketika penataan berlangsung sekitar tiga sampai tujuh hari sampai penataan atau pembangunan ulang selesai atau sampai kondisi memungkinkan untuk mereka membuka lapak kembali. Namun, untuk wilayah pedagang yang belum terkena penataan tetap dapat berjualan menunggu tempat wilayah mereka menjadi wilayah di perbaiki.

FEEDBACK MASYARAKAT ATAU WISATAWAN

Masyarakat dalam hal ini juga termasuk dalam komunikan yang memakai pedestrian Malioboro. Pemerintah Juga melakukan komunikasi kepada Masyarakat, beberapa masyarakat pengguna pedestrian malioboro memberikan umpan balik yang positif. Komunikasi yang berjalan dengan baik terbukti dengan masyarakat yang telah mengetahui renovasi pedestrian dan berhati-hati pada saat proyek berlangsung

FAKTOR PENGHAMBAT KOMUNIKASI PEMERINTAHAN

Proses komunikasi yang terjadi antara komunikator dan komunikan pasti mengalami beberapa rintangan atau hambatan sehingga pesan tidak terserap dengan baik oleh komunikan. Faktor penghambat ini dapat menyebabkan konflik yang membuat proses komunikasi terhambat. Faktor penghambat dari ketiga objek berbeda dalam setiap proses pemerintahannya dapat dijelaskan di tabel berikut :

Tabel 6.

Tabel Faktor Penghambat komunikasi Pemerintah

Kasus / Objek	Faktor Penghambat
Parkir	<ul style="list-style-type: none">• Penggunaan Bahasa• Pemberian Penafsiran• Perbedaan Status• Ketidaksediaan seseorang memberikan atau menerima informasi• Tekanan• Pembatasan

PKL	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan Bahasa • Perbedaan Status
Masyarakat/Wisatawan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan

Sumber : Wawancara Narasumber

LANGKAH STRATEGIS UNTUK MENCAPAI SASARAN KOMUNIKASI PEMERINTAHAN EFEKTIF

MEMILIH BAHASA, SALURAN DAN MEDIA YANG TEPAT

Langkah strategis untuk mencapai sasaran komunikasi pemerintahan yang efektif telah dilakukan oleh komunikator yaitu UPT Malioboro dengan menggunakan bahasa yang tepat yang aapat di terima komunikan yang disampaikan melalui Ketua paguyuban sehingga mendapatkan outcome dan impact yang diharapkan yaitu semua juru parkir setuju untuk pindah kedalam Taman Parkir Abu Bakar Ali.

Seperti yang terjadi pada komunikasi kepada PKL yang berjalan dengan lancar, pemerintah menggunakan bahasa dan media yang tepat sehingga tidak terjadi penolakan sehingga , pada saat negosiasi PKL pesisir malioboro sepakat untuk berkerjasama dengan pemerintah dengan melakukan buka tutup bergilir pada saat terjadinya renovasi pedestrian di kawasan malioboro.

Pemerintah juga melakukan komunikasi dengan warga yang berkunjung kekawasan malioboro. Karena dalam kebijakan ini , bukan hanya tukang parkir yang terlibat namun juga masyarakat dalam hal ini bisa turis asing ataupun wisatawan lokal yang datang dan berkunjung kekawasan maliboro. Pemerintah melakukan komunikasi kepada masyarakat dalam rangka memberitahukan bahwa lahan parkir sudah berpindah ke malioboro.hal yang dilakukan pemerintah adalah berkeja sama dengan media massa, cetak ataupun online dalam memberikan informasi bahwa parkir telah berpindah. Selain itu, pemerintah juga memasang beberapa spanduk yang bertuliskan informasi yang memberitahukan perpindahan parkir dan memasangnya di pusat kota.

MEMINIMALISIR RINTANGAN DALAM KOMUNIKASI PEMERINTAHAN

Seperti yang kita ketahui ada sedikitnya enam rintangan ataupun hambatan dalam melakukan komunikasi pemerintahan. Dalam hal ini , komunikator yaitu Pemerintah Kota Yogyakarta diwakilkan oleh UPT Malioboro sebisa mungkin mengurangi hambatan tersebut. Hal itu dilakukan dengan menggunakan bahasa yang tepat agar komunikan mengerti apa yang ingin di sampaikan oleh pemerintah. Setelah itu , komunikator berusaha mengurangi tekanan yang dirasakan oleh komunikan dalam hal ini adalah Juru parkir. Hal itu dilakukan dengan memberikan gaji sebagai program pengelolaan juru parkir selama 3 bulan.

MENGUASAI TENTANG PRAKTEK KOMUNIKASI PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF

Menguasai tentang Praktek Komunikasi Pemerintahan yang Efektif berkaitan dengan tatacara melakukan komunikasi dan koordinasi sehingga hambatan dan rintangan dapat minimalisir. Komunikator harus dapat ber inovasi dan mengetahui teknis dalam pembangunan lingkungan sehingga mengetahui masalah-masalah yang ada dilapangan.

PENUTUP

Proses komunikasi berjalan dengan efektif dan sangat lancar terdapat pada objek Pedagang Kaki Lima. Dimana , Komunikator dan Komunikan dapat berkerjasama dengan baik sehingga hambatan dan rintangan yang ada dapat di kurangi bahkan dihilangkan. Sikap saling menerima dan memberikan informasi yang baik antara komunikan dan komunikator membuat kebijakan dapat terlaksana dengan baik dan benar.

Proses komunikasi sedikit terhambat dalam relokasi parkir dari pesisir Malioboro ke taman parkir Abu Bakar Ali. Hambatan dan rintangan yang terdapat dalam proses komunikasi ini membuat implementasi kebijakan berjalan alot. Namun ,hal tersebut dapat di atasi dengan langkah-langkah efektif yang di ambil oleh komunikator.

Pada saat negosiasi atau tatap muka berlangsung maka dapat terjadi dimana yang tadinya menjadi komunikator akan menjadi komunikan pula. Pada proses negosiasi komunikatormaka akan terjadi komunikasi dua arah sehingga komunikan dan komunikator dapat berubah sesuai dengan siapa yang menjadi pembicara dan siapa yang menjadi audience pada saat proses komunikasi tersebut berlangsung. Dari hasil proses komunikasi pemerintahan yang berlangsung UPT menjadi Komunikator yang dominan dalam proses komunikasi pemerintah dalam penataan kawasan Malioboro.

Proses komunikasi yang ditampilkan oleh Kotler dalam paradig Harold Lasswell dapat di implementasikan dalam Komunikasi Pemerintah dalam Proses penataan kawasan Malioboro tahun 2015-2016. Walaupun mendapatkan hambatan namun komunikasi yang dilakukan oleh UPT Malioboro dapat berjalan efektif dan akhirnya dapat diterima oleh semua komunikan yaitu Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima dan pengunjung Malioboro.

PUSTAKA ACUAN

- Abidin, Y. Z. (2016). *Komunikasi Pemerintahan : Filosofi, Konsep, dan Aplikasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ardiansah, D. (2014). *Kampung Bahasa Sebagai City Branding Kota Pare : Studi Kualitatif Komunikasi Pemerintah Kabupaten Kediri*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Ardianto, Elvinaro, & Erdiyana. (2004). *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rorsdakarya Offset.
- Dilla, S. (2012). *Komunikasi Pembangunan*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Pratama, M. A., Wiriawan, B., Maria, D., Bidari, G. S., & Santoso, S. I. (2015). *Menata Kota Melalui Rencana Tata Ruang (RDTR)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Purnomo, E. P. (2010). Development of Local Institutions towards on Participation and Communication Model in the United Kingdom. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 280-288.

Wawancara Narasumber :

- Bapak Agus Purnomo, S.IP sebagai Divisi Pemeliharaan Kebersihan, Pertamanan, Sarana dan Prasarana Unit Pelaksana Teknis Malioboro (2017)
- Bapak Narto sebagai Ketua Paguyuban Parkir kawasan Malioboro (2017)
- Bapak Siswanto sebagai Pedagang Kaki Lima kawasan Malioboro (2017)
- Muthia A. E sebagai Wisatawan kawasan Malioboro (2017)
- Rahayu sebagai Wisatawan kawasan Malioboro(2017)
- Diah sebagai Wisatawa kawasan Malioboro (2017)

Undang-Undang :

- Peraturan Walikota Yogyakarta Tahun 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro- A.Yani
- Peraturan Walikota Yogyakarta no. 16 tahun 2011 tentang Perpakiran
- Peraturan Walikota Yogyakarta No. 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan Kedudukan, Fungsi, dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Kawasan Malioboro Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.